
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan

Asian Review of Public Administration

Tekstur baru konsep dasar pendidikan anak usia dini

Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Remaja dan Perilaku Berisiko di Era Digital: Penguatan Peran Keluarga

ASUHAN KEBIDANAN KOMUNITAS

ASPEK HUKUM JASA KONSTRUKSI (Berdasarkan UU No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa

Konstruksi, PP No 22 Tahun 2020 Tentang Jasa Konstruksi, dan sudah disesuaikan

dengan perubahan yang ada pada UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)

Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan

Petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan mukim dalam Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam

Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR)

Majalah Risalah NU edisi 120 "Umul Hazn (DUKA UMAT DAN BANGSA)"

Islam, Media and Education in the Digital Era

Pemilihan umum 1987

Peningkatan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam melalui Supervisi Akademik,

Diklat dan Partisipasi dalam Kelompok Kerja Guru

Unika Dalam Wacana Publik: Gegara Pan(dem)ik: Terhimpit Untuk Melejit

Sekolah bukan pasar

Petunjuk teknis penyelenggaraan Haji

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia

Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pada Masa Covid-19

APBD Partisipatif

Implementasi Kebijakan Publik

Solusi Low Back Pain pada Kehamilan dengan Terapi Akupunktur Aurikular

Buku pedoman dan himpunan petunjuk teknis penyelenggaraan otonomi daerah di

Propinsi DKI Jakarta

Prof. Hembing pemenang the Star of Asia Award

Buku Ajar Praktek Kerja Lapang Manajemen Pelayanan Kesehatan (PKL MPK)

Buku Ajar Praktik Klinis Rekam Medis (Pengantar Awal Turun Lapang)

Pandemi di Ibu Pertiwi: Kajian Literatur "Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia"

The Role of Public Administration in Building a Harmonious Society

Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DALAM PERSPEKTIF HUKUM

EKONOMI SYARIAH

Petunjuk teknis penyelenggaraan haji tahun 1423 H/2003 M.

Buku panduan pos PAUD inklusif

Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame

Edukasi Dalam Rangka Optimalisasi Masyarakat Menghadapi Covid-19

50 tahun peranan pos & telekomunikasi

MANAJEMEN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH

Kesehatan Reproduksi Remaja

Hukum Administrasi Negara Sektoral

Assessing the Role of Health Center Equipped with Beds in Promoting Safe
Motherhood and Child Survival
SOSIOLOGI PEMBANGUNAN DESA
Islamic Education in Indonesia and Malaysia

*Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan*

*Downloaded from
tafayor.com by guest*

DEACON NYLAH

Asian Review of Public

Administration Yayasan Kita Menulis
Technical guidelines on local
government practices in Nanggroe Aceh
Darussalam according to local laws.

Tekstur baru konsep dasar

pendidikan anak usia dini Penerbit
Andi

Penyusunan buku ini merupakan salah
satu hal penting, maka diharapkan dapat
menampilkan gambaran komprehensif
terhadap masyarakat umum untuk
mendapat masukan dan saran sehingga
menambah kesempurnaan dalam buku
ini.

Teknik Keselamatan dan Kesehatan

Kerja Jakad Media Publishing
Buku ini merupakan hasil laporan
mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati
Bandung pada program KKN Dari Rumah
2020

Remaja dan Perilaku Berisiko di Era Digital: Penguatan Peran Keluarga

Universitas Brawijaya Press
Buku Dasar-Dasar Perencanaan
Pendidikan ini dibuat sebagai referensi
dan juga memberikan wawasan
tambahan lebih rinci mengenai proses
kegiatan mempersiapkan keputusan dan
kebijaksanaan sebagai panduan bagi
pelaksanaan, pengendalian, dan
pengawasan penyelenggaraan
pendidikan yang berkaitan dengan
tujuan yang akan dicapai. Sejalan
dengan perkembangan zaman dan
kemajuan teknologi, perencanaan
pendidikan harus mengantisipasi dan

beradaptasi dalam mempersiapkan
solusi terbaik sehingga tujuan dari
perencanaan dapat dicapai dengan
maksimal. Secara detail pembahasan
buku ini meliputi : Wawasan dasar
Pendidikan Administrasi pendidikan dan
perencanaan pendidikan Problema dan
tantangan dalam pembangunan, serta
peran dan fungsi perencanaan dalam
pembangunan pendidikan Definisi,
karakteristik, dan prinsip-prinsip
perencanaan pendidikan Nomenklatur,
struktur/tingkatan, jenis dan bentuk
perencanaan pendidikan Pendekatan,
metode dan teknik-teknik yang
digunakan dalam perencanaan
pendidikan Proses perencanaan
pendidikan Keterkaitan perencanaan
pendidikan dengan aspek demografi
Keterkaitan perencanaan pendidikan
dengan aspek sosial-ekonomi
Keterkaitan perencanaan pendidikan
dengan aspek sumber daya manusia
Keterkaitan perencanaan pendidikan
dengan aspek sumber daya keuangan
Keterkaitan sistem perencanaan dengan
penganggaran dalam pendidikan
Pengenalan model manajemen stratejik,
perencanaan stratejik dan program
stratejik, serta politik perencanaan
pendidikan Pengenalan kasus tentang
sistem perencanaan pembangunan
pendidikan nasional di Indonesia
ASUHAN KEBIDANAN KOMUNITAS EGC
Despite their close geographic and
cultural ties, Indonesia and Malaysia
have dramatically different Islamic
education, with that in Indonesia being
relatively decentralized and discursively
diverse, while that in Malaysia is
centralized and discursively restricted.

The book explores the nature of the Islamic education systems in Indonesia and Malaysia and the different approaches taken by these states in managing these systems. The book argues that the post-colonial state in Malaysia has been more successful in centralising its control over Islamic education, and more concerned with promoting a restrictive orthodoxy, compared to the post-colonial state in Indonesia. This is due to three factors: the ideological makeup of the state institutions that oversee Islamic education; patterns of societal Islamisation that have prompted different responses from the states; and control of resources by the central government that influences centre-periphery relations. Informed by the theoretical works of state-in-society relations and historical institutionalism, this book shows that the three aforementioned factors can help a state to minimize influence from the society and exert its dominance, in this case by centralising control over Islamic education. Specifically, they help us understand the markedly different landscapes of Islamic education in Malaysia and Indonesia. It will be of interest to academics in the field of Southeast Asian Studies, Asian Education and Comparative Education.

ASPEK HUKUM JASA KONSTRUKSI (Berdasarkan UU No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, PP No 22 Tahun 2020 Tentang Jasa Konstruksi, dan sudah disesuaikan dengan perubahan yang ada pada UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) Routledge

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang harus ditetapkan dengan Undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan kedudukan Dewan

Perwakilan Rakyat dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja lebih kuat dari pada kedudukan pemerintah. Ini tanda kedaulatan rakyat. Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri maka segala tindakan yang menempatkan beban rakyat diantaranya pajak, harus ditetapkan dengan undang-undang Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan
GUEPEDIA

Buku Hukum Administrasi Negara (HAN) Sektor bertujuan guna memenuhi kebutuhan perkuliahan mata kuliah Hukum Administrasi Negara Sektor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Syiah Kuala University Press

Duka Umat dan Bangsa (Umul Hazn)
Kalimat inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sekarang ini sangat sering meluncur dari lidah kita. Kita mendengar berita kematian setiap saat. Saudara, handai tolan, tetangga hingga orang yang tidak kita kenal. Kabar datang melalui medis sosial, telepon, televisi dan media lainnya. Setiap hari hampir 900 orang meninggal sehingga total hingga 12 Juli lalu mencapai 67.355 orang dan lebih 1.000 tenaga kesehatan. Covid-19 telah menggeleparkan sekitar 2,19 juta jiwa sejak ia menyerang kita lebih setahun. Korbannya tidak pandang bulu. Dokter yang selama ini berjibaku menyelamatkan pasien juga terkena dan

menjadi korban. Pejabat, pengusaha, bahkan juga ulama juga tercatat sebagai korbannya. Bahkan, yang lebih menyedihkan dada kita adalah kematian ulama yang sudah mencapai 500 orang lebih. Kita baru saja melepas sedih KH Nawawi Abdul Jalil, Penghasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Belum kering air mata kita ditinggal Gurutta Dr. Muhamamd Sanusi Baco. Belum hilang sembab mata kita mendapat kabar wafatnya KH Zainuddin Jazuli, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Kediri. Berderet nama bermunculan sejak Covid-19 meneror kita. Sejumlah ulama yang memiliki kedekatan kepada Allah akhir-akhir ini. Teror Covid-19 tidak bisa kita pungkiri. Hingga Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dalam silaturahmi virtual dengan para ulama hari Senin, 12 Juli lalu menyatakan keprihatinan itu. Ia menyebut kondisi kita yang sangat genting karena Covid-19. Ia mengajak para ulama untuk bersama-sama pemerintah memerangi Covid-19. Kondisi seperti ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi dan memerlukan perhatian seksama semua pihak dan menjadi kewajiban kita semua. Data MUI menyebut, ulama yang wafat dalam suasana Covid-19 ini lebih dari 541 orang, 451 laki-laki dan 90 perempuan. "Ini juga merupakan kehilangan besar. Mencetak ulama itu tidak gampang, tidak mudah," ungkap Kiai Ma'ruf. Data jumlah ulama yang wafat itu dikemukakan wakil Sekjen MUI KH. A. Ghaffar Rozin yang juga ketua asosiasi pesantren NU atau Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU). Banyak ulama yang meninggal sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, setelah diputuskan sebagai pandemi Maret tahun lalu, khususnya ulama yang berusia lanjut. RMI mencatat, hingga

akhir tahun lalu sebanyak 333 kiai NU meninggal dunia terhitung sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan pada Maret 2020. Jumlah itu terdiri dari 286 ulama laki-laki dan 47 ulama perempuan. RMI tidak bisa memastikan semuanya meninggal karena Covid-19. Masih ada ulama yang meninggal yang tidak terdata, dan juga di luar NU. Kematian ulama berdasarkan data RMI NU meningkat signifikan dibandingkan 2019 yang tak lebih dari 50 orang. RMI mencatat pada 2020 di bulan Februari sebanyak empat orang. Maret-Juni ada 37 ulama meninggal. Juli sebanyak 23 orang. Agustus 41 orang, September 90 orang, November 187 orang, Desember 253 orang, dan pada Januari tercatat total 333 ulama meninggal. Sementara Kementerian Agama Desember 2020 lalu melansir sekitar 6.000 santri di 81 pesantren tertular Covid-19. Dahsyat. Lidah kita kelu tak mampu lagi berkata tentang kematian ulama. Ulama selama ini kita kenal sebagai pelita kehidupan. Para ulama adalah pemandu dan panutan umat. Ilmu yang dimiliki ulama belum semuanya ditularkan kepada murid, keluarga dan masyarakat sehingga ikut terkubur pula ilmu-ilmu berharga itu. Hal ini mengingatkan kita pada sebuah hadis: "Ambillah (pelajarilah) ilmu sebelum ilmu pergi!" Sahabat bertanya, "Wahai Nabiyullah, bagaimana mungkin ilmu bisa pergi (hilang)?" Rasulullah SA menjawab, "Perginya ilmu adalah dengan perginya (wafatnya) orang-orang yang membawa ilmu (ulama)" Rasulullah bersabda: "Meninggalnya ulama adalah musibah yang tak tergantikan, dan sebuah kebocoran yang tak bisa ditambal. Wafatnya ulama laksana bintang yang padam. Meninggalnya satu suku lebih mudah bagi saya daripada meninggalnya satu orang ulama" (HR al-

Thabrani) Mari, sayangi ulama kita dengan cara menjaga protokol kesehatan dan mematuhi pemerintah. Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR) Risalah NU Magazine

Nyeri punggung bawah sering ditemukan pada kehamilan. Hal ini dapat menjadi indikasi pentingnya edukasi kesehatan tentang nyeri punggung bawah untuk ibu hamil khususnya pada trimester II dan III dan suami serta keluarganya. Hadirnya buku ini memberikan pengetahuan terkait penanganan nyeri punggung bawah (Low Back Pain) pada kehamilan melalui metode akupunktur aurikular. Buku ini telah didasarkan pada kajian secara mendalam sehingga hasilnya benar-benar valid. Semoga dengan hadirnya buku ini memperkaya keilmuan berkenaan dengan penanganan Low Back Pain, dan secara khusus memberikan pemikiran dalam dunia kesehatan.

Majalah Risalah NU edisi 120 "Umul Hazn (DUKA UMAT DAN BANGSA)" Get Press

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh fakta bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU tentang Pelayanan Publik) yang diharapkan dapat menghadirkan pelayanan publik yang layak, berkualitas, dan prima kepada masyarakat, dalam implementasinya tidak memperlihatkan hasil yang memuaskan hingga lebih dari 7 (tujuh) tahun pemberlakuannya. Gencarnya upaya untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik pada level pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan melalui penataan daerah, dengan salah satu penekanannya melalui pemekaran daerah, dalam kenyataannya memperlihatkan bahwa pemekaran daerah cenderung gagal mewujudkan tujuan

pembentukannya. Tulisan dalam buku ini mengangkat permasalahan mengapa kebijakan pemekaran daerah belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan menggunakan pemikiran New Public Service sebagai "kaca mata" utama dalam melihat masalah yang dihadapi dalam implementasi UU tentang Pelayanan Publik, tulisan ini mengungkapkan bahwa implementasi UU Pelayanan Publik masih terkendala di dalam masalah tingkat kepatuhan para penyelenggara pelayanan publik dan belum menempatkan masyarakat sebagai pusat dari pelayanan publik. Menurut tulisan ini, keberhasilan implementasi UU Pelayanan Publik sangat bergantung kepada faktor kepemimpinan, anggaran dan kepedulian masyarakat. Tulisan ini merekomendasikan agar perlu diintensifkan pengawasan oleh DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terhadap pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan terhadap implementasi standar pelayanan publik harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari internal maupun eksternal. Untuk itu perlu dibentuk gugus tugas untuk memantau pelaksanaan UU tentang Kebijakan Publik, baik di DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota maupun di penyelenggara pelayanan publik di K/L dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Untuk menyelesaikan praktek pungli atau pelayanan berbelit dan lambat, perlu diselesaikan melalui sistem penganggaran. Jumlah anggaran yang tidak ideal antara jumlah kegiatan yang terkait pelayanan publik seperti pemberian barang, jasa, dan administrasi dengan banyaknya

masyarakat yang hendak dilayani, akan terus dijadikan alasan untuk membenarkan praktek pungli.

Islam, Media and Education in the Digital Era Routledge

Buku ini secara rinci akan menguraikan pembahasan sebagai berikut: Seputar Wawasan Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik Kerangka Teoritik Perihal Partisipasi dan Kebijakan Publik Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan APBD APBD Partisipatif Antara Harapan dan Kegagalan Buku ini secara rinci akan menguraikan pembahasan sebagai berikut: Seputar Wawasan Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik Kerangka Teoritik Perihal Partisipasi dan Kebijakan Publik Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan APBD APBD Partisipatif Antara Harapan dan Kegagalan

Pemilihan umum 1987 Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Buku yang sedang anda baca ini juga merupakan bukti lain betapa civitas akademika Unika SOEGIJAPRANATA tidak pernah diam dalam keterbatasan yang ada melainkan justru kepanikan akan pandemik ini telah memunculkan semangat untuk semakin peduli dan terlibat dalam wacana publik. Dalam masa kurang dari 3,5 bulan atau sekitar 110 hari, tercatat lebih dari 50 artikel telah dibuat dan dimuat dalam berbagai media massa. Artinya hampir 2-3 hari sekali selalu muncul gagasan, pendapat dan ungkapan pemikiran yang dimuat dan bisa dibaca oleh publik. Tentu saja, bukan berarti Unika SOEGIJAPRANATA mengharapkan agar pandemic tidak berlalu sehingga bisa memaksa civitas akademika untuk tetap produktif menghasilkan karya, tetapi justru ini untuk menunjukkan semangat yang diwarisi dari nama yang digunakan oleh Lembaga ini. Civitas Akademika tidak

boleh amem mlempem, tetapi justru harus bergerak aktif dan produktif pada saat yang lain sedang termangu-mangu oleh perubahan-perubahan dan keterpaksaan-keterpaksaan baru. Dalam himpitan pandemik Unika SOEGIJAPRANATA tetap harus melejit, bukan untuk meraih kejumawaan, tetapi justru karena panggilan untuk berbuat lebih. Ungkapan saudara kita Muslim, Fastabiqul Khairot, berlomba-lomba dalam kebaikan, sesuai dengan semangat penebusan Yesus, karena kita sudah merasakan Kasih Yesus yang begitu besar dalam hidup ini, maka saatnya membagikan kasih kepada sesama dengan ilmu pengetahuan yang juga sudah dikaruniakan kepada kita. *Peningkatan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam melalui Supervisi Akademik, Diklat dan Partisipasi dalam Kelompok Kerja Guru* Cipta Media Nusantara

Buku ini membahas mengenai perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia, kebijakan pemerintah pusat, upaya dan inovasi pemerintah daerah, serta bentuk partisipasi masyarakat dan penanganan berbasis kearifan lokal. Berhubung buku ini merupakan kajian kepustakaan (library research) sehingga dilakukan analisis teks dan wacana dimana data bersumber dari buku, jurnal, pemberitaan media massa, dan lain-lain. Adapun data yang digunakan sebagian besar berasal dari platform online, oleh karena itu memungkinkan adanya perkembangan baru disaat buku ini telah sampai di tangan pembacanya, mengingat penanganan dan perkembangan pandemi Covid-19 ini sangatlah dinamis.

Unika Dalam Wacana Publik: Gegara Pan(dem)ik: Terhimpit Untuk Melejit
Badan Penerbit FHUI
Implementasi kebijakan merupakan

tahapan dari proses kebijakan setelah penetapan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program pemerintah. Implementasi merupakan fenomena yang kompleks sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai dampak (outcome). Program-program pemerintah pada hakekatnya bersifat (top-down) yaitu perintah mulai dari pimpinan hingga jajaran staf paling bawah hal ini dapat di ilustrasikan dalam program pemerintah yaitu pelayanan kartu penduduk, pelayanan akta kelahiran dan pelayanan akta kematian. Hal ini bertujuan untuk mendata warga negara Indonesia di seluruh Nusantara, baik yang ada di pedesaan maupun daerah perbatasan Negara.

Sekolah bukan pasar Media Sains Indonesia

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Dengan keselamatan dan kesehatan kerja maka diharapkan tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman serta mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Tantangan K3 di era industrialisasi dan globalisasi yang berjalan beriringan dewasa ini disamping memberikan kemudahan proses produksi dapat pula menambah jumlah, ragam bahaya di tempat kerja maupun tingkat keseriusan kecelakaan kerja. Buku ini diharapkan dapat mengisi ruang-ruang kosong informasi yang dibutuhkan oleh para penggiat kesehatan dan ketenagakerjaan dalam upaya menciptakan zero accident di perusahaan atau lingkungan kerja. Buku

ini membahas bagian-bagian menarik dan penting seperti: Bab 1 Peranan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Dunia Industri Bab 2 Dasar Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Dunia Industri Bab 3 Faktor-Faktor Kecelakaan Kerja dan Pencegahannya Bab 4 Undang - Undang dan Organisasi Keselamatan Kerja Bab 5 Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja Bab 6 Keselamatan Kerja Bidang Kebakaran Bab 7 Keselamatan Kerja Bidang Transportasi dan Lalu Lintas Bab 8 Keselamatan Kerja Bidang Perminyakan, Pertambangan dan Perkebunan Bab 9 Bahan Berbahaya dan Keselamatan Kerja Bab 10 Peralatan Perlindungan Diri Bab 11 Investigasi Kecelakaan Kerja dan Pencegahan Bab 12 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan OHSAS 18001:2007 di Perusahaan Bab 13 Peranan Pemerintah dan Ikatan Profesi Penyuluhan dan Latihan Keselamatan Kerja

Petunjuk teknis penyelenggaraan Haji INTELIGENSIA MEDIA (KELOMPOK INTRANS PUBLISHING)

The proceedings of the Social and Humanities Research Symposium (SoRes) shares ideas, either research results or literature review, on islam, media and education in the digital era. Some recent issues consists of innovative education in the digital era, new media and journalism, islamic education, human wellbeing, marketing and fintech in terms of islamic perspective, economic welfare, law and ethics. It is expected that the proceedings will give new insights to the knowledge and practice of social and humanities research. Therefore, such parties involved in social and humanities research as academics, practitioners, business leaders, and others will acquire benefits from the contents of the

proceedings.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia Jakad Media Publishing

Buku ini merupakan Pedoman bagi para mahasiswa rekam medis terkait dengan praktik klinis rekam medis. Diharapkan buku ini dapat memberikan pengetahuan sebelum turun lapangan yang juga berisi soal sehingga mahasiswa atau praktisi dapat berlatih secara mandiri.

Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pada Masa Covid-19 Penerbit Buku Kompas

Buku ini merupakan hasil penelitian tesis. Semula berjudul "Pengaruh Kompetensi Supervisi Akademik Pengawas, Pengalaman Pendidikan dan Pelatihan serta Partisipasi dalam Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Indramayu." Secara berturut-turut, hasil penelitian ini diikutsertakan pada Simposium Nasional Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 dengan karya tulis yang dibuat karya poster dengan judul yang sama dan menjadi peserta terbaik 2 kategori karya poster. Karya ini juga diikutsertakan dalam kegiatan Expose Hasil Penelitian "Evaluasi Pembangunan Pendidikan Agama dan Keagamaan di Indonesia" Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Kementerian Agama pada tahun 2019 dengan judul karya "Pengembangan Profesional Guru Pendidikan Agama Islam Melalui Supervisi Akademik, Diklat dan Kelompok Kerja Guru di Kabupaten Indramayu Jawa Barat." Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif dan signifikan kompetensi supervisi akademik pengawas terhadap kinerja guru PAI di Kabupaten Indramayu.

Artinya semakin tinggi dan positif kompetensi supervisi akademik maka semakin tinggi dan positif pula kinerja guru PAI di Kabupaten Indramayu. Pengaruh kompetensi supervisi akademik pengawas terhadap kinerja guru PAI di Kabupaten Indramayu sebesar 51,80%. Sisanya sebesar 48,20% masih dipengaruhi oleh faktor-faktor atau sebab-sebab lain yang tidak disertakan dalam analisis. Nilai korelasi kompetensi supervisi akademik pengawas terhadap kinerja guru PAI di Kabupaten Indramayu sebesar 0,720. Artinya tingkat keeratan pengaruh kompetensi supervisi akademik pengawas terhadap kinerja guru PAI di Kabupaten Indramayu berada dalam kategori korelasi kuat.

APBD Partisipatif LP2M UIN SGD Bandung

Sektor Jasa Konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional, terkhusus pada saat ini Bangsa Indonesia sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur. Hadirnya UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha di bidang Jasa Konstruksi terutama perlindungan bagi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Masyarakat Jasa Konstruksi. Pada bulan April 2020 dikeluarkan PP No. 22 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi sebagai Peraturan Pelaksana UU Jasa Konstruksi. Berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga berdampak adanya beberapa perubahan pada keberlakuan UU Jasa Konstruksi. Pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja, di keluarkan PP 14 Tahun 2021 tentang Perubahan PP 22 Tahun 2020. Berlakunya berbagai peraturan di bidang Jasa Konstruksi dan ketersediaan literatur buku- buku hukum mengenai

Jasa Konstruksi masih terbatas di Indonesia, maka buku ini dihadirkan. Buku ini hadir dengan menarasikan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Bagi pihak-pihak yang bersinggungan dengan Jasa Konstruksi atau ingin mendalami Hukum Jasa

Konstruksi baik Penyedia Jasa, Pengguna Jasa, Pemerintah, Asosiasi Profesi, dan Kalangan Perguruan Tinggi baik mahasiswa maupun dosen maka buku ini layak untuk dibaca.

Implementasi Kebijakan Publik Uwais
Inspirasi Indonesia
MANAJEMEN KEPEMIMPINAN KEPALA
SEKOLAH